

PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGANGGURAN TERBUKA: Sebuah Dilema

Oleh: Siti Sanisah*

ABSTRACT: *The current national system of education is claimed not to match the field of work. This phenomenon is the reflection of the high level of unemployment graduated from secondary and tertiary level of education. The issue of unemployment seems to be a continuous debate since the graduates wish to be government employees or labours and staff members of companies, without any willing to be entrepreneurs. A survey on the 2009 workforce nationally showed that 64% and 74% of the secondary and tertiary school alumni, respectively, work in government offices private companies. This indicates that the alumni tend to be unemployed simply because they wait the chance to be officers and labours, and reluctant to run their own business.*

KEYWORDS: *Perguruan tinggi, tenaga kerja, pengangguran*

JUMLAH pengangguran di Indonesia berdasarkan jenjang Perguruan Tinggi (PT) cukup mengkhawatirkan, tahun 2005 mencapai 385.538 orang, 2006 menjadi 375. 601 orang, tahun 2007 menjadi 409.890 orang, tahun 2008 mencapai 740.206 orang dan terakhir tahun 2009 menunjukkan ke angka 1,14 juta orang.¹ Diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah. Sinyal-emen tentang abadinya masalah pengangguran tidak terbantah lagi, namun ironisnya bila pengangguran banyak berasal dari kalangan sarjana. Apalagi mengingat laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) yang melihat pola pengangguran di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai fenomena unik dimana tingkat pengangguran lebih banyak ditemukan di kalangan mereka yang mengenyam pendidikan tinggi.

Sedikitnya ada tiga hal yang menjadi alasan utama kenapa alumni PT banyak yang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, mutu dan relevansi kurikulum pendidikan dan pasar kerja.² Hambatan kultural menyangkut

*Kandidat doktor pada Program Pascasarjana UNJ, Prodi Manajemen Pendidikan, ini adalah guru SMP Negeri 5 Jonggat, Lombok Tengah dan dosen luar biasa pada FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.

budaya dan etos kerja. Sementara masalah kurikulum pendidikan adalah belum adanya mutu dan relevansi kurikulum pengajaran di lembaga pendidikan tinggi yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian sumber daya manusia (SDM) yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih disebabkan rendahnya kualitas SDM untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Namun, ada pihak yang mensinyalir bahwa tingginya pengangguran di kalangan terdidik merupakan hal yang wajar dalam masa transisi menuju masyarakat industri. Tingkat pengangguran yang tinggi pada kalangan terdidik bukan kesalahan pendidikan tetapi karena pada saat pendidikan berkembang, sektor ketenagakerjaan belum berubah. Investasi ekonomi masih kalah cepat dibandingkan investasi tenaga kerja.³ Jika dielaborasi lebih jauh, pernyataan ini akan menunjukkan pada kita bahwa perkembangan sektor ekonomi swasta, akan menambah kebutuhan tenaga terampil dan profesional tingkat menengah, baik lulusan SMK (sekolah menengah kejuruan) maupun diploma. Sedangkan program diploma masih kurang. Padahal kecenderungannya, dunia profesional lebih suka menggunakan lulusan diploma karena tidak terlalu teoritis, tetapi praktis dan siap pakai. Sedangkan, tenaga kerja bergelar sarjana, sebenarnya dibutuhkan di sektor riset dan pengembangan yang baik.

Di sisi lain proyeksi kebutuhan tenaga kerja sesungguhnya dapat digunakan dalam perencanaan pendidikan, sehingga program-program yang diformulasi lebih terfokus menjawab tantangan masalah pendidikan yang ada. Akan tetapi, dari awal pendidikan umumnya lebih berat ditujukan untuk mencetak generasi cerdas yang dapat menghayati nilai-nilai fundamental kultural. Implikasinya, jika mengkaitkan dunia pendidikan dan pasar kerja, tidak akan berhasil karena pendidikan akan selalu bergerak lebih lambat dari kebutuhan tenaga kerja. Namun, melihat ketimpangan antara lulusan pendidikan dengan daya serap pasar kerja tentu tidak bisa dibiarkan berlarut. Mau tidak mau harus diakui bahwa perencanaan ketenagakerjaan yang sangat akurat pun tidak akan berhasil, dan itu tidak perlu karena dalam perencanaan ketenagakerjaan ada prinsip substitusi.⁴ Artinya jika tidak ada dokter, bisa pakai paramedis. Tidak ada paramedis, dukun pun bisa. Perencanaan ketenagakerjaan yang bersifat indikatiflah yang dibutuhkan.

Terkait dengan masalah di atas, maka tugas fundamental yang harus segera ditangani Kementerian Pendidikan Nasional adalah menyelaraskan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja di sektor formal maupun informal. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan di antara 21,1 juta angkatan kerja di Indonesia, yang 4,1 juta adalah pengangguran. Sehingga

dapat diprediksikan bahwa hingga tahun 2025, pengangguran masih banyak, dengan penyebab utama minimnya lapangan kerja. Data terakhir dari BPS untuk tahun 2009, jenis pengangguran terbuka lebih banyak dihuni lulusan PT (D1, D2, D3, dan S1). Karena itu, persoalan tersebut perlu diatasi, apalagi sebagian besar memilih bekerja di sektor formal.

WAJAH DUKA PT DI INDONESIA

Abad 21 ini, dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Banyaknya alumni PT yang memiliki nilai bagus dan gelar, namun ketika kembali ke masyarakat bingung apa yang harus diperbuat. Kondisi *real* masyarakat yang jauh berbeda dengan kehidupan di kampus membuat PT harus mampu menjadikan lulusannya mampu bersaing dan mampu menawarkan mutu serta pelayanan yang bagus. Untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan, PT harus mampu melayani berbagai kebutuhan masyarakat secara kompetitif. Nilai kompetitif PT sesungguhnya terletak pada kemampuannya melayani masyarakat dengan kualifikasi kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Karenanya institusi PT harus membuat visi, misi dan tradisi yang berorientasi efisiensi dan profesionalisme guna membangun dan menghasilkan lulusan yang kompetitif.

Bagaimanapun juga tantangan masa depan, khususnya era globalisasi, adalah perubahan masyarakat dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Salah satu ciri masyarakat industri adalah terbuka, kritis, dinamis, mampu bersaing, dan cerdas.⁵ Tanpa semua itu tidak mampu dia mengadakan refleksi, menganalisis data, berfikir logis sistematis dan dapat mengantisipasi kehidupan masa depan yang cepat berubah. Untuk itu, PT harus mengantisipasi kecenderungan ini dalam mempersiapkan lulusan yang profesional sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Di samping itu tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah persaingan dunia kerja. Dengan banyaknya PT yang menghasilkan lulusan siap kerja secara besar-besaran yang diikuti meledaknya tenaga kerja produktif, maka persaingan semakin tajam. Padahal daya tampung lapangan kerja di Indonesia sangat terbatas. Akibatnya, banyak pengangguran terdidik sampai pada tingkat titik jenuh, kemudian diperparah kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini, maka lapangan kerja semakin sempit.

Fakta cenderung menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia (perguruan tinggi/PT) lebih produktif mencetak lulusan ketimbang lapangan kerja yang tersedia. Contoh, banyak PT Negeri (PTN) membuka jalur ekstensi dan D3, meski kenyataannya kampus tersebut tak memiliki sarana pendidikan dan dosen yang sebanding dengan jumlah mahasiswa-

nya. Sedangkan PT Swasta (PTS) harus menghemat pengeluaran untuk dana pendidikan karena takut mahasiswa terbebani uang kuliah terlalu tinggi. Tindakan ini mengakibatkan PT lebih berfungsi sebagai mesin penghasil ijazah ketimbang manusia yang memiliki kematangan ilmu dan kemandirian. Preseden ini diperkuat oleh kenyataan bahwasanya banyak alumni PT harus menunggu minimal satu tahun (bahkan bertahun-tahun) untuk memperoleh satu pekerjaan. Tidak jarang gaji yang diperoleh tidak sebanding dengan investasi pendidikan yang dikeluarkan, dan pekerjaan yang diperoleh tak sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Jenjang pendidikan tinggi sebagai jaminan memperoleh pekerjaan yang baik ternyata menjadi doktrin bagi kebanyakan masyarakat kita. Pandangan ini dalam banyak hal turut memperparah banyaknya lulusan PT yang *jobless*. Realitanya masih dapat disaksikan dewasa ini bahwa para sarjana masih terus disibukkan persoalan mencari kerja, sementara ketersediaan lapangan kerja makin sempit.

Alhasil, tidak dapat lagi dipungkiri bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih berorientasi pada menghasilkan lulusan walaupun tingkat kemandirian dan semangat kewirausahaannya rendah. Persentase yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan bahkan mempekerjakan orang lain masih sedikit. Padahal jika ditinjau dari *logical perspektif*, menjadi seorang sarjana seharusnya punya kemampuan lebih dibandingkan yang bukan sarjana. Seorang sarjana harus mampu berpikir konstruktif, kreatif, dan Inovatif. Sarjana harus menjadi pelopor, tidak hanya mampu menunggu kesempatan. Namun, faktanya tidak semua sarjana mempunyai pemikiran seperti ini. Padahal, peradaban sebuah bangsa yang maju sangat ditentukan oleh kemajuan pendidikannya.

Namun perlu juga jadi perhatian bahwa dilema penyelenggaraan pendidikan di PT, yaitu antara memenuhi permintaan pasar atau bertahan dalam proses pendidikan tinggi yang ideal.⁶ Permintaan pasar dipenuhi PT dengan membuka program studi yang laku di pasar tenaga kerja. Alasan utama sebuah PT melakukan jalan pintas seperti itu adalah untuk bertahan hidup dan memperluas bisnisnya. PT sekarang mempunyai paradigma *profit oriented*. Maka, orientasinya menghasilkan keuntungan, jumlah mahasiswa harus banyak. Mereka berbuat demikian karena dituntut bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Sehingga muncullah *image* bahwa pendidikan tinggi adalah pabrik pendidikan. Disebut pabrik, karena telah sepenuhnya menjadi lahan bisnis, hampir tidak mempunyai kaitan dengan komitmen sosial, dengan idealisme mencerdaskan bangsa. Sebagai urusan dagang, sebagian berlaku prinsip ada mutu, ada harga, dan makin tinggi mutu, makin mahal pula ongkos yang harus dibayar. Sekali-

pun tak bermutu, fasilitas pendidikan asal-asalan dan dosen tak memadai, toh mahasiswa rela membayar lebih. Dan celaknya, inilah pula bisnis yang nyaris tak mengenal bangkrut. Persaingan bisnis pendidikan cukup kejam, namun hampir tak ada pabrik yang bernama PT tutup karena kalah bersaing.

Fenomena itu makin menambah persoalan PT kita yang bukannya mengatasi masalah pengangguran tapi malah menambahnya. Kegagalan PT menjawab persoalan pengangguran memberi bukti nyata tentang itu. Persoalannya, mulai dari mana membenahi pendidikan nasional kita? Kiranya perlu penafsiran tajam dalam hal ini, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang demikian kompleks maka mesti dimulai dari yang paling besar (prioritas). Dalam dunia pendidikan, masalah terbesar yang mesti jadi prioritas penyelesaian adalah kualitas dan mutu. Artinya, kualitas sistem dan metode pendidikan, dosen, kesejahteraan tenaga pendidik, metode mengajar, dan infrastrukturnya. Dalam banyak hal patut dicermati, peningkatan kualitas pendidikan adalah titik penentu yang mempertinggi kesempatan orang terdidik memperoleh pekerjaan.

DILEMA KUALITAS LULUSAN PT

Tingginya angka pengangguran lulusan PT disebabkan berbagai faktor, antara lain, kompetensi keahlian tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, lulusan program studi sudah jenuh di masyarakat, atau tidak memiliki keahlian apa pun untuk bersaing di dunia kerja.⁷ Fenomena ini didukung hasil penelitian Ditjen Dikti yang menunjukkan bahwa, mereka yang tidak dapat bersaing di dunia kerja umumnya lulusan program studi ilmu sosial. Dengan demikian, tentu kualitas PT dalam melahirkan sarjana/diploma akan terus dipertanyakan. Lulusannya dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan pasar, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi kesenjangan ini?

Fakta mengenai lonjakan pengangguran terdidik saat ini makin memprihatinkan, bila tidak mau disebut menyedihkan (lihat data BPS di halaman depan). PT sering menempuh jalan pintas dengan membuka program studi yang sedang "laris" hanya dengan tujuan untuk tetap bertahan hidup, sementara sarana prasarana pendukung program studi tersebut masih minim dimiliki. Muaranya, lulusan yang dihasilkan pun tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk bertarung di dunia kerja. Jalan pintas ini dilakukan disebabkan oleh kentalnya nuansa *profit oriented* di kalangan PT⁸ yang hanya mengharapkan keuntungan lewat jumlah mahasiswa yang banyak, dalam memenuhi kebutuhan operasional. Karena tuntutan itu kualitas seringkali diabaikan.

Salah satu sebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah, karena PT dianggap sebagai bisnis yang menghasilkan keuntungan besar.⁹ Banyak dosen tidak memenuhi syarat mengajar dan PT kurang melaksanakan tugasnya sebagai *research center and development*. Tak mengherankan bila kurikulumnya kurang sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Melihat fakta ini, semestinya lembaga-lembaga pendidikan punya tanggung jawab moral terhadap lulusannya. Dunia pendidikan jangan sampai jadi “pabrik” tenaga pengangguran terdidik. Jalannya tentu saja membangun mentalitas entrepreneur dan *life skill*, sehingga tamatan PT bukan sekadar mencari pekerjaan, melainkan menciptakan lapangan pekerjaan.

PENDIDIKAN TINGGI DAN TUNTUTAN PROFESIONALISME

Profesionalisme pada prinsipnya merupakan pembedahan ulang atas satu benih diskusi yang telah ada selama manusia tumbuh dan berkembang dalam kesadaran terhadap berbagai realitas yang ada di luar dirinya. Jadi, benih profesionalisme sebenarnya sudah ada sejak manusia dilahirkan sebagai pribadi unik, mempunyai bakat dan kemampuan berbeda dari orang lain. Sejak itu, seorang manusia disiapkan menjadi tenaga profesional yang sesuai dan cocok dengan bakat dan kemampuannya. Manusia tidak dapat dimodifikasi menjadi profesional dalam segala bidang kehidupan manusia. Manusia telah ditakdirkan untuk menjadi ahli dalam bidang tertentu.

Benih profesionalisme tumbuh menjadi besar dan kokoh saat ilmu-ilmu mendeklarasikan kemandiriannya dari ikatan *mater scientarium*. Ilmu-ilmu menjadi semakin terspesialisasi dan menuntut untuk dikuasai dengan kemampuan khusus. Ia membangun batas-batas dalam hal metode kerja dan tidak boleh dilanggar kedaulatannya bahkan tidak boleh dicampurkan dengan metode dan cara kerja ilmu lain. Karena itu, seorang manusia jarang, bahkan tidak akan mungkin, menguasai dan mendalami semua ilmu yang ada. Ia hanya dapat dan mampu menjadi ahli di bidang ilmu tertentu.

Dalam dunia modern, benih profesionalisme sangat kuat dan sudah masuk ke wilayah seluruh lapisan masyarakat. Setiap manusia sadar bahwa dirinya menjadi profesional hanya dalam bidang tertentu. Profesionalisme merupakan kesadaran diri seorang manusia sebagai makhluk terbatas dan menjadi sahabat manusia modern. Tuntutan profesionalisme juga mempengaruhi atmosfer pendidikan di dalamnya. Dunia pendidikan terdorong untuk mampu menghasilkan ahli-ahli yang profesional dalam bidang tertentu.

Sistem pendidikan yang menekankan spesialisasi tertentu menelurkan banyak ahli profesional. Ia melahirkan orang yang mempunyai kompetensi besar dalam bidang ilmu (profesi) tertentu sehingga masing-masing bidang garapan dalam masyarakat mengalami kemajuan. Ia memacu usaha manusia untuk menjadi semakin sejahtera, suatu kejutan yang sangat menggembirakan.

Meskipun demikian, suatu sistem yang menuntut profesionalisme dapat mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Sistem ini mengkondisikan orang untuk hanya tahu tentang bidang yang digelutinya. Ia dapat menjadi pribadi yang begitu peduli terhadap bidang ilmunya, tetapi sangat tidak peduli terhadap bidang di luar dirinya. Ia meleak untuk melihat persoalannya sendiri, tetapi *tunanetra* untuk memperhatikan pesona dari masalah-masalah bidang ilmu lainnya. Ia hanya berkutat dengan profesinya dan tidak berpikir tentang hal-hal lain yang lebih matang dan manusiawi. Akibatnya, individu kehilangan kemampuan dialog dan komunikasinya. Ia kehilangan bagian dari eksistensinya karena bahasa setiap ilmu dan profesi telah menjadi semakin teknis dan esoteris.

Apabila sistem pendidikan modern telah sampai pada taraf menciptakan keterpecahan masyarakat, maka sistem itu telah melangkahi hakikatnya. Pendidikan yang baik membuahkan kebijaksanaan. Pendidikan harus menjadi rahim bagi kelahiran profesional yang peduli terhadap masalah masyarakat. Suatu sistem yang menghasilkan ahli yang hidup bersama, merasakan persoalan, dan peduli terhadap kepedihan masyarakat.

Profesionalisme bagi PT adalah sebuah keniscayaan. Apalagi dalam era globalisasi sekarang ini, PT dituntut untuk makin kompetitif dalam melayani kebutuhan masyarakat. Karena nilai kompetitif PT sesungguhnya terletak pada kemampuannya dalam melayani masyarakat dengan kualifikasi kemampuan dan profesionalisme tinggi. Untuk mampu menghasilkan lulusan yang profesional, PT harus menggunakan pola strategi yang lebih terbuka dan fleksibel. Artinya, pola yang dikembangkan tidak terikat secara kaku sebagaimana yang digariskan, tetapi lebih realistis sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Upaya PT di Indonesia dipengaruhi oleh empat faktor utama (1) *otonomi*, yakni ruang gerak yang leluasa untuk merespon perubahan yang terjadi di luar PT; (2) *enterpreneurship*, agar para pimpinan PT memiliki kepekaan terhadap perubahan makro diluar PT yang selanjutnya mampu mengakomodasikannya; (3) *administrator*, dosen dan mahasiswa yang *full-time*, karena proses belajar mengajar yang baik hanya terselenggara dalam kondisi yang demikian; dan (4) *pranata hukum*

yang kondusif dan mendorong semangat kompetitif dan bukannya peraturan-peraturan yang baku dan kaku sifatnya.¹⁰

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mampu berkompetisi adalah dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi.¹¹ Hal tersebut bisa dilakukan melalui penerapan sistem manajemen mutu, dan yang paling sederhana adalah memenuhi Badan Akreditasi Nasional (BAN). Sebenarnya ini saja tidak cukup, masih diperlukan suatu komisi PT yang bertugas mengaudit dan melakukan evaluasi terus menerus terhadap institusinya sendiri. Mekanisme manajemen mutu ini biasanya meliputi '*self evaluation*'; '*peer review by panels of experts*', yang biasanya mengikutsertakan anggota dari 'luar' institusi itu; menggunakan informasi statistik yang relevan dan indikator-indikator kinerja; serta survey terhadap kelompok-kelompok kunci dalam civitas akademika.

Dalam banyak hal, tuntutan profesionalisme sangat mempengaruhi dalam dunia pendidikan. Suatu sistem pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila mampu menyediakan kesempatan kondusif bagi kelahiran para profesional dalam bidang tertentu. Semakin banyak spesialis yang dihasilkan maka semakin berkualitas sistem dalam pendidikan tersebut, sebab keberhasilan suatu sistem pendidikan ditentukan oleh out-putnya yang profesional.

Di satu pihak, tuntutan profesionalisme memberikan kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat. Dengan lahirnya para profesional dari rahim sistem pendidikan, masing-masing bidang kehidupan akan dipacu untuk dapat berkembang lebih baik. Di pihak lain, tuntutan profesionalisme yang terlalu tinggi hanya akan menghasilkan ilmuwan yang tinggal dalam menara gading, ahli yang terkurung dalam alur tertentu dan tuna aksara dalam alur lain. Akibatnya, laju perubahan dalam masyarakat tidak diimbangi oleh visi yang holistik untuk memadukan, mengarahkan, dan memberi makna kepada kemajuan itu.

Dengan demikian sistem pendidikan tinggi itu memadai apabila, *pertama*, mampu melahirkan para profesional yang cakap intelektual, emosional dan sosial; tidak gagap dengan spesialisasi pilihannya. *Kedua*, mampu menyediakan peluang bagi diajarkannya bidang pengetahuan umum, *Ketiga*, mampu membuka peluang kehadiran kelompok diskusi yang dapat menampung peserta didik dari jurusan apa saja untuk membahas masalah apa saja. Kesempatan seperti ini membantu proses *partusnya* para profesional serta menghidupkan kemampuan dialog dan komunikasi dalam masyarakat. Masyarakat dapat memadukan, mengarahkan dan memberi makna pada kemajuan yang dialaminya. Intinya, masyarakat tidak kehilangan visi hidupnya yang holistik.

DILEMA PENGANGGURAN

Dilema penganggur terdidik "*mundur kena, maju kena*" menggambarkan kondisi para lulusan PT saat ini. Sekian waktu bergumul di kampus ternyata tak mampu mengangkat harkat penyandang status sarjana. Bagaimana tidak menjadi dilema, penganggur kalangan terdidik di tahun 2007 saja naik mencapai 740.206 orang. Polemik penganggur terdidik terjadi akibat tidak sejalannya kebutuhan industri terhadap SDM dengan kemampuan individu seorang sarjana. Dunia kerja mengajukan persyaratan bagi lulusan PT yang memiliki kemampuan individu dan kerja tim, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan komunikasi, dan pengalaman kerja. Hal ini tidak didapat dari kuliah formal dengan materi terbatas, sebaliknya kebanyakan mahasiswa memperolehnya karena inisiatif sendiri. Padahal, tak sejalan dengan kebutuhan tersebut justru diterapkan kebijakan kurikulum yang sangat padat dan waktu kelulusan yang dipersingkat.

Implikasinya, kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan *soft skill* tambahan dari luar universitas menjadi terbatas. Seharusnya, padatnya kegiatan kuliah dapat dibuat menjadi informal dengan alur mengajar dua arah, maksudnya komunikasi berjalan dari dosen ke mahasiswa, pun sebaliknya. Agar kegiatan belajar mengajar yang kaku justru tidak membelenggu potensi mahasiswa dalam hal komunikasi, membangun jaringan dan kreativitas. Sejatinya, jika kemampuan tersebut bisa ikut terbina bukan tidak mungkin mahasiswa berinisiatif membangkitkan jiwa kewirausahaannya.

Maksudnya, ini akan menjadi pencitraan dari visi sebuah organisasi pergerakan mahasiswa dengan kegiatan yang juga mendukung keilmuannya. Misalnya saja organisasi yang memiliki kebiasaan diskusi sosial atau komunitas bahasa Inggris. Kegiatan ini selain dapat dilaksanakan setelah kegiatan kuliah pun dapat meningkatkan *soft skill*. Tentunya tanpa harus menghapuskan sisi idealisme mahasiswa dari benak, sehingga dapat memenuhi dan merawat keduanya, antara idealisme dan tuntutan hidup. Dalam hal ini, universitas harus memberi kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan lunak, karena tentu universitas dibayar mahal bukan tanpa jaminan kepada lulusannya.

Dengan memilih jalur mandiri itu mahasiswa malah akan lebih mampu membuka peluang lapangan kerja baru dengan memperkerjakan karyawan. Ketersediaan lapangan kerja pun tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa. Dengan biaya pendidikan yang begitu mahal, sangat wajar jika lulusan menginginkan tingkat pengembalian (*cost*) yang sesuai dari dunia

kerja. Lulusan banyak yang menginginkan kerja layak di kantor, sehingga berkas lamaran justru banyak bertumpuk di sektor ini, dengan begitu banyak saingan. Usaha tersebut setidaknya dapat meminimalisir jumlah pengangguran yang ada.

Dari data yang disajikan di halaman depan, jika dirinci lagi maka sekitar 58,7 juta orang (58,2%) berada di pedesaan dan 42,1 juta orang (41,8%) berada di perkotaan. Sedangkan angkatan kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka berjumlah 9,1 juta orang (9,1%) naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,0 juta orang (8,1%). Sejumlah 4,1 juta orang (44,8%) pengangguran terbuka berada di pedesaan dan 5,0 juta orang (55,2%) berada di perkotaan. Sebanyak 2,8 juta orang dari pengangguran terbuka merupakan penganggur usia muda (15-19 tahun).¹² Data ini akan sangat berarti jika pola penyelesaian masalah pengangguran dilakukan dengan menggunakan pendekatan lokal dalam perspektif otonomi daerah.

Sepanjang tahun 2009, kondisi ketenagakerjaan masih belum mengalami perbaikan yang berarti. Angka pengangguran terbuka tahun 2009 diperkirakan akan semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh penciptaan lapangan kerja masih relatif kecil dan cenderung tidak meningkat. Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang hanya mencapai 3,9% dan peningkatan angkatan kerja sebesar lebih dari 2 juta orang, maka jumlah pengangguran terbuka diperkirakan akan meningkat menjadi 15,1 juta orang. Oleh karena itu perlu kiranya pemerintah melakukan upaya-upaya cermat guna mengurangi penganggur terbuka.

Dengan banyaknya PT yang menghasilkan lulusan siap kerja secara besar-besaran yang diikuti meledaknya tenaga kerja produktif, maka persaingan semakin tajam. Padahal daya tampung lapangan kerja sangat terbatas. Akibatnya, banyak pengangguran terdidik sampai pada tingkat titik jenuh, diperparah kondisi ekonomi yang tidak menentu, maka lapangan kerja semakin sempit. Fenomena ini tidak hanya dirasakan tenaga kerja terdidik, lebih parah lagi dirasakan pengangguran tidak terdidik yang tentu dengan kompetensi yang minim. Implikasi logis dari dua dilema pengangguran ini tentunya berkontribusi pada peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Dilema bangsa terkait dengan pengangguran terbuka sesungguhnya difasilitasi oleh dua hal yaitu menumpuknya jumlah pengangguran ter-

didik (lulusan PT) dan tidak terdidik dengan tingkat kompetensi yang tidak sinkron dengan kebutuhan pasar (lapangan kerja). Hal ini diperparah dengan minimnya lapangan kerja yang tersedia jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun, terlebih dari kalangan lulusan PT yang sudah mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk pendidikannya (dengan kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja). Di samping itu juga lambatnya pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan perkembangan ekonomi di beberapa daerah.

Rekomendasi

- a. Membuat kebijakan jangka pendek yang realistis
 - Mengadakan diversifikasi kurikulum, yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dewasa ini. Sehingga alumnus siap memasuki dunia kerja dengan membuka peluang kerja sendiri (wiraswasta).
 - *Conscient action*. Pemberian kesadaran pada pencari kerja bahwa akan lebih baik jika mereka dapat membuka lapangan kerja sendiri, ini dapat dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak (pemerintah, LSM, Akademisi/mahasiswa, Lembaga-Lembaga Agama dll).
 - Pemberdayaan secara ekonomis dan sosial, penyadaran melalui pembentukan sikap dan mental yang dilakukan pada tahap pertama di atas harus diikuti dengan pemberdayaan tahap kedua yang lebih bersifat ekonomis dan konkret.
 - Memberikan dukungan modal kepada pekerja sektor informal.
 - Memberantas budaya KKN yang faktanya telah menghancurkan ekonomi negara. Masalah pengangguran yang melanda Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fenomena KKN yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian Bangsa kita secara sistematis dan menggurita.

- b. Membuat kebijakan jangka panjang

Melalui desentralisasi sentra pertumbuhan ekonomi ke daerah sejalan dengan Otonomi Daerah. Desentralisasi pertumbuhan ekonomi harus dipindahkan dari pusat ke daerah, dari Jawa ke luar Jawa, dari daerah padat industri ke daerah yang tidak padat industri sehingga bisa menekan angka urbanisasi dari desa ke kota. Jika pabrik, industri, perusahaan berskala nasional atau internasional dibangun juga di daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi di daerah/wilayah itu. Begitu terjadi pertumbuhan ekonomi, maka akan menciptakan penambahan tenaga kerja baru. Agar investor menanamkan modalnya di daerah, berbagai infrastruktur, komunikasi, transportasi harus dibangun sebagaimana halnya di kota atau daerah yang memiliki peluang pertumbuhan ekonomi

tinggi. Program ini dapat dikomunikasikan melalui *workshop*, seminar, simposium yang bisa mempengaruhi pengambil keputusan di tingkat atas; juga melalui wakil rakyat di DPR dengan menyalurkan aspirasi ini kepada mereka. Atau melalui pembentukan opini publik di media massa secara terus menerus, melalui *lobby*, *bargaining* dan sebagainya.

CATATAN AKHIR

1. BPS per Februari 2010.
2. HAR Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Gramedia: Jakarta, 2002, h. 23.
3. Ace suryadi, *Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan*, Balai Pustaka: Jakarta, 1999, h. 56.
4. Conyer Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1994, h. 6.
5. HAR Tilaar, *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi*, cetakan kedua, Grasindo: Jakarta, 2001, h. 76.
6. Nina Cobb, (editor), *The Future of Education*, College Entrance Examination Board: New York, 1994, h. 78.
7. Fasli Jalal, Pidato Rembuk Nasional Pendidikan 2008 Februari, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional.
8. Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Adicita Karya Nusa: Yogyakarta, 2001, h. 89.
9. Robby Djohan, *Leaders and Social Capita: Lead to Togetherness*, Kaifa: Bandung, 2001, 123.
10. Clark Kerr, *The Uses of the University*, Harvard University Press: Cambridge, MA, 1995, h. 231.
11. Edward Sallis, *Total Quality Management in Education* (terjemahan), Ircisod: Jogjakarta, 2008, h. 34.
12. Jelamu Ardu Marius, Memecahkan masalah pengangguran Di Indonesia. *Makalah*, IPB, April 2004, h. 10.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS per Februari 2010
- Cobb, Nina (editor), *The Future of Education*, College Entrance Examination Board: New York, 1994.
- Diana, Conyer., *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1994.
- Djohan, Robby, *Leaders and Social Capita: Lead to Togetherness*, Kaifa: Bandung, 2001.
- Jalal, Fasli, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Adicita Karya Nusa: Yogyakarta, 2001.
- Kerr, Clark, *The Uses of the University*, Harvard University Press: Cambridge, MA, 1995.
- Kompas, *Pengangguran Terdidik Masih Tinggi*, Kamis, 27 September 2009

<http://cetak.kompas.com>

Marius, Jelamu Ardu, Memecahkan masalah pengangguran Di Indonesia, *Makalah*, IPB, April 2004.

Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education* (terjemahan), Ircisod: Jogjakarta, 2008.

Suryadi, Ace, *Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan*, Balai Pustaka: Jakarta, 1999.

Tilaar, HAR., *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Gramedia: Jakarta, 2002.

Tilaar, HAR., *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi*, cetakan kedua, Grasindo: Jakarta, 2001.